

ABSTRAK

Program pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas umum merupakan langkah pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan pemerintahan serta berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Tanah merupakan salah satu obyek atau bagian terpenting dalam proses pembangunan. Tingginya kebutuhan akan tanah kemudian memunculkan permasalahan yang berkaitan dengan tanah tersebut. Di Kabupaten Manggarai – Nusa Tenggara Timur, konflik perebutan tanah selalu terjadi dan melibatkan pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat. Nilai tanah yang terus meningkat dan kebutuhan akan tanah yang sangat tinggi menyebabkan sebagian orang atau kelompok berupaya menguasai tanah, dan sebagian orang atau kelompok berupaya mempertahankan tanah tersebut. Berkaitan dengan konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Manggarai, studi ini berupaya mendeskripsikan hal-hal yang menjadi akar permasalahan konflik tanah, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik, dan juga upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sebenarnya konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Manggarai dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya nilai ekonomis tanah dan tingginya kebutuhan akan tanah (infrastruktur pemerintahan, perumahan, kuburan, fasilitas umum, dan lain-lainnya). Selain itu budaya juga merupakan alasan individu atau kelompok mempertahankan atau memperjuangkan tanah, dimana tanah merupakan bagian dari tatanan budaya masyarakat Manggarai, dan sebagian besar konflik tanah yang terjadi berhubungan dengan tanah ulayat atau tanah masyarakat adat. Oleh karena itu budaya merupakan hal penting yang perlu dipahami dalam konflik tanah di Kabupaten Manggarai.

Kata kunci : Kabupaten Manggarai, konflik tanah, tanah adat.